



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
*BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 18 Juni 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Nicaragua on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua mengenai Pembebasan Visa

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'L' or similar, located below the text of Pasal 1.

bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Nicaragua on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2013 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Bistek Simbolon



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait saling kunjung warga negara kedua negara, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, ke Republik Indonesia dan Republik Nikaragua;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Nikaragua untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Nikaragua, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa

untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler yang terletak di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga yang tinggal bersama mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 3

TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 5

PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang

berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas.

PASAL 6

HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini, dengan alasan ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional, atau apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7

CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru, sebelum mulai diterbitkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 9

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 10

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

1. Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan dinasnya pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.
2. Salah satu Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya apabila diduga seseorang memasuki Wilayah Pihak lainnya dengan paspor diplomatik atau dinas yang palsu.
3. Pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima dapat menjalankan haknya terhadap orang tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan dan revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

PASAL 12

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari kedelapanbelas bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Bahasa yang digunakan apabila terjadi perbedaan penafsiran adalah Bahasa Inggris.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK NIKARAGUA**



SAMUEL SANTOS LÓPEZ

Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO

**ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE EXENCIÓN
DE
VISAS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS,
OFICIALES Y DE SERVICIO**

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Nicaragua referidos de ahora en adelante, individualmente como la "Parte" y colectivamente como "las Partes";

RECONOCIENDO las amistosas relaciones existentes entre los dos países;

DESEOSOS de simplificar los procedimientos relacionados con las visitas de nacionales de los dos países, portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, a la República de Indonesia y a la República de Nicaragua;

BASADOS en las leyes y regulaciones vigentes en los respectivos países;

HAN ACORDADO lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISA**

1. Nacionales de la República de Indonesia, portadores de un pasaporte diplomático, oficial o de servicio válido, no están obligados a obtener una visa de entrada, salida, tránsito o permanencia en el territorio de la República de Nicaragua por un período no superior a noventa (90) días, a partir del día de su ingreso.
2. Nacionales de la República de Nicaragua, portadores de pasaporte diplomático, oficial o de servicio válido, no están obligados a obtener una visa para entrada, salida, tránsito o permanencia en el territorio de la

República de Indonesia por un período no superior a treinta (30) días, a partir de la fecha de ingreso.

ARTÍCULO 2

VISA PARA MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

Los ciudadanos de cualquiera de las Partes, titulares de pasaporte diplomático, oficial o de servicio, que sean asignados como miembros de la misión diplomática oficina consular en el territorio de la otra Parte, así como sus familiares que conviven con ellos, deberán obtener el visado de entrada necesario en la Embajada de la otra Parte antes del ingreso.

ARTÍCULO 3

PUNTO INTERNACIONALES DE CONTROL

Los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio de cualquiera de las Partes, podrán entrar, transitar y salir del territorio de la otra Parte en cualquier lugar autorizado para el tráfico internacional de pasajeros.

ARTÍCULO 4

DURACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS PASAPORTES

Los pasaportes de los nacionales de cualquiera de las Partes deberán tener 6 (seis) meses de validez como mínimo para poder entrar en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 5

RESTRICCIÓN DE VISA

Los portadores de pasaportes validos de cualquiera de las Partes mencionadas en este Acuerdo, deberán entrar y salir del territorio de la otra Parte por cualquier punto autorizado tal propósito por las autoridades de migración, sin restricción alguna, con excepción de aquellas regulaciones establecidas por razones de seguridad, migración, aduanas o sanitaria y otras restricciones que

pueden aplicarse legalmente a los portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicios.

ARTÍCULO 6 DERECHO A LA DENEGACIÓN

Las autoridades competentes de cada Parte tendrán derecho a denegar la entrada o terminar la estadia de cualquier persona autorizada a la exención de visado en virtud del presente Acuerdo, por razones de orden público, salud pública o seguridad nacional.

ARTÍCULO 7 MUESTRAS DE PASAPORTES

Las Partes intercambiarán, a través de los canales diplomáticos, muestras de sus respectivos pasaportes, así como también especímenes de nuevos pasaportes previo a su puesta en circulación, al menos treinta (30) días antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia entre las Partes en la interpretación o implementación de este Acuerdo, deberá ser resuelta amigablemente a través de consultas.

ARTÍCULO 9 SUSPENSIÓN

1. Por razones de mantenimiento de orden público, salud pública o de seguridad nacional, cualquiera de las Partes, podrá suspender la aplicación del presente Acuerdo total o parcialmente.
2. La introducción de las medidas establecidas en el párrafo 1 de este Artículo así como la suspensión de dichas medidas deben ser informadas mediante

notificación escrita, por vía diplomática, con al menos 30 días de antelación.

ARTÍCULO 10

PROTECCIÓN CONTRA LA FALSIFICACIÓN

1. Las partes deberán garantizar que sus respectivos pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios cuenten con los más altos niveles de protección contra falsificaciones.
2. Si una de las partes sospecha que una persona entra al territorio de la otra Parte, con pasaporte diplomático, oficial o de servicio falsificado, deberá informar a la otra Parte.
3. Las Autoridades del país receptor deben ejercer sus derechos contra estas personas, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes.

ARTÍCULO 11

ENMIENDAS

Este Acuerdo podrá ser enmendado o revisado, si es estrictamente necesario, por mutuo consentimiento expresado por escrito por las Partes. Tales enmiendas y revisiones deberán entrar en vigencia en la fecha en que las partes así lo determinen.

ARTÍCULO 12

ENTRADA EN VIGENCIA, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días a partir de la fecha de la última notificación escrita en la cual las Partes, a través de los canales diplomáticos se informen mutuamente acerca del cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
2. Este Acuerdo es válido por un período indefinido, a menos que una de las Partes notifique por escrito, a través de la vía diplomática a la otra Parte, su

decisión de darlo por terminado, a más tardar noventa (90) días antes de la fecha de su finalización.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

HECHO en Yakarta, el dieciocho de Junio del año dos mil trece, en tres versiones en idiomas Indonesio, Español e Inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretación, se utilizara el texto en inglés como idioma de trabajo.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE INDONESIA**



R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Ministro de Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA**



SAMUEL SANTOS LÓPEZ
Ministro de Relaciones Exteriores



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR
OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Nicaragua, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNIZING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to simplify procedures related to visits of nationals of both countries, holders of diplomatic or official/service passports, to the Republic of Indonesia and the Republic of Nicaragua;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or official/service passports shall not be required to obtain visas to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Nicaragua for a period which does not exceed 90 (ninety) days from the date of entry.

2. Nationals of the Republic of Nicaragua, holders of valid diplomatic or official/service passports shall not be required to obtain visas to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2

VISA FOR MEMBER OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS

Nationals of either Party, the holders of diplomatic or official/service passports, who are assigned as members of diplomatic and consular mission located in the territory of the other Party, so as the members of their family that the holder lives with, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

ARTICLE 3

CHECK-POINTS OF ENTRY

The nationals of the Party holding valid diplomatic or official/service passports shall enter the territory of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 4

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 5

VISA RESTRICTION

The holders of the valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point

authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary, and other regulations which may be legally applicable to holders of diplomatic or official/service passports.

ARTICLE 6 RIGHT OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption provided by the present Agreement, due to reasons of public order, public health or national security, or if it considers that person undesirable.

ARTICLE 7 SPECIMEN OF PASSPORT

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their respective passports being used by each Party before the entry into force of this Agreement as well as specimens of any new passports before their introduction, with no later than 30 days in advance.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 9 SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend all or part of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction as well as termination of the measures stated in Paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party 30 (thirty) days in advance through diplomatic channels.

ARTICLE 10

PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

1. The Parties shall provide their diplomatic and official/service passports with the highest level of protection against counterfeiting.
2. A Party shall inform the other Party if it suspect that a person enters the territory of a Party with counterfeited diplomatic or official/service passport.
3. Authorities of the receiving Party may exercise its rights to such person according to the prevailing laws and regulations.

ARTICLE 11

AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment and revision shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

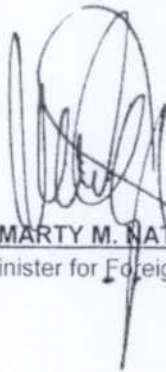
1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated under their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

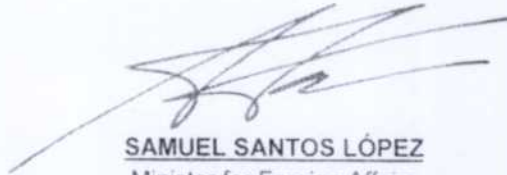
DONE in Jakarta on this eighteenth day of June, in the year two thousand and thirteen, in duplicate, in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. The working language used in any differences of interpretation is the English text.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF NICARAGUA



SAMUEL SANTOS LÓPEZ
Minister for Foreign Affairs